



**BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang** : a. bahwa indikator kinerja utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1129/AA.05/2022 Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum Perangkat Daerah sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 5...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 15 dan angka 16 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Ketapang.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
8. Sasaran strategis adalah penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh PD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
11. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
13. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) yang selanjutnya disingkat dengan IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
14. IKU Pemerintah Daerah adalah Ukuran keberhasilan dari suatu tujuan sasaran strategis Pemerintahan Daerah.
15. IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD.

16. Definisi Operasional adalah...

16. Definisi Operasional adalah penjelasan dan pengertian mengenai indikator yang akan diukur serta metode perhitungan berisi cara dalam menentukan jumlah atau besaran capaian indikator, berupa formulasi atau rumusan perhitungan, disertai dengan satuan target dan tipe perhitungan.
 17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang.
2. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB VA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
KETENTUAN PERALIHAN

3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 8A

- (1) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya penyesuaian kembali terhadap perumusan capaian IKU Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.
 - (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Ketapang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Ketapang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 11 September 2023

BUPATI KETAPANG,
TTD
MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
Pada tanggal 11 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,
TTD
ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2023 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,

MINTARIA, SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG INDIKATOR
KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Visi : Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera							
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik							
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)			Skor Pengukuran Capaian Reformasi Birokrasi Yang Ditekankan Pada 8 Area Perubahan (masalah Tata Kelola Pemerintahan) oleh Kemenpan RB	Hasil Evaluasi IRB Pemerintah Daerah Oleh Kemenpan RB	Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bappeda
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai yang diperoleh dari Hasil Evaluasi oleh Kemenpan RB mencakup Komponen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Oleh Kemenpan RB	
			Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Satuan Ukuran Ditetapkan Untuk Menilai kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah Yang	Hasil Evaluasi IPKD Oleh Provinsi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

					Efektif, Efisien, Transparan, Dan Akuntabel Dalam Periode Tertentu Yang penilaiannya dilakukan Pemerintah Daerah Propinsi		
				Opini BPK	Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah Didasarkan Kesesuaian Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, Dan Efektivitas sistem Pengendalian Intern	Hasil Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Oleh BPK-RI	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif	Rata-rata Nilai IKM PD/survey data primer	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Indeks yang digunakan untuk melihat Tingkat kematangan (maturity level) Dari pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik di Instansi Pemerintah	Hasil Evaluasi Indeks SPBE Pemerintah Daerah Oleh Kemenpan RB	Dinas Komunikasi dan Informatika

Misi 2 : Melanjutkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur							
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah			Ukuran Pembangunan Infrastruktur Daerah Mencakup Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi, Irigasi Rmh Tdk Layak Huni, penataan Ruang dan Rasio Konektifitas	Jumlah total komponen indikator infrastruktur relevan dikali koefisien /	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Rakyat., Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan.
	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana			Perhitungan Terhadap Komponen Bahaya, Kerentanan dan Kapasitas di Kabupaten oleh BNPB	Hasil Pengukuran IRBI Oleh BNPB	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Misi 3 : Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Memiliki Daya Saing							
	Terwujudnya peningkatan derajat pendidikan, kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia			Ukuran Capaian Pembangunan Manusia yang diukur berdasar Tiga dimensi dasar : umur Panjang Dan hidup sehat , Pengetahuan, Serta standar hidup layak	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Dr. Agoesdjam Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Sosial,P3A,dan KB
Misi 4 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang Merata dan Berkeadilan							
	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun			Indeks komposit yg dihitung berdasarkan Indeks ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, Dan indeks Ketahanan Lingkungan.	IKS : Indeks Ketahanan Sosial IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan $IDM = \frac{IKS + IKE + IKL}{3}$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kecamatan

Misi 5 : Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat							
	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi			Perkembangan kegiatan dalam Prekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah dan kemakmuran Masyarakat meningkat.	$r = \frac{\text{PDRB}(t-1) - \text{PDRB}(t)}{\text{PDRB}(t)} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>r = Laju Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>$\text{PDRB}(t)$ = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal)</p> <p>$\text{PDRB}(t-1)$ = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal)</p>	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan; Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
			Meningkatnya kedaulatan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Ukuran indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan disuatu wilayah. Dimana terdapat 3 aspek ketahanan pangan : ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.	$Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i x_{ij}$ <p>i = indikator ke 1 -9 j = kabupaten $Y(j)$ = Indeks Ketahanan Pangan a_i = bobot masing-masing indikator ke i X_{ij} = Nilai standarisasi indicator ke i pada kabupaten</p>	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan	Indeks Gini			Untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh	$GR = 1 - \sum f_i(Y_i - Y_{i-1})$ <p>dimana:</p> <p>f_i = Jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke-i Y_i = Jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke-i</p>	Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, DMPTSP, Dinsos P3A dan KB
		Tingkat Kemiskinan			Kemiskinan dipandang sebagai Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan	$P_{ij} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$ <p>dimana:</p> <p>z = Garis uk miskin</p>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, PUTR, Dinas Perkim - LH Dinas

					dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan	\bar{y} = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan : $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk	Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, Dinas Sosial P3A dan KB, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Bappeda, Dispora
			Menurunnya pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk Usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun tidak bekerja atau pengangguran.	$f(x) = a/b \times 100\%$ a : Jumlah Pengangguran b : Jumlah Angkatan Kerja	
Misi 6 : Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Seluruh Masyarakat Ketapang							
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	-	Penilaian terhadap kondisi lingkungan Hidup suatu daerah yang diukur Melalui penggabungan komponen indeks Kualitas air, indeks kualitas udara da indeks tutupan lahan	$IKLH = (IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (IKTL \times 40\%)$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 NINTARIA, SH., MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700703 199903 1 007

BUPATI KETAPANG,
 TTD
 MARTIN RANTAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Rumus/Sumber	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Penilaian/Evaluasi LPPD oleh Kemendagri	Nilai Hasil Evaluasi LPPD Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat Daerah
		Persentase PD Dengan Nilai RB Minimal B	Nilai Hasil Evaluasi RB Perangkat Daerah oleh Tim Evaluator Daerah	<u>PD Dengan Nilai RB Minimal B</u> x 100% Jumlah Seluruh PD	Sekretariat Daerah
	Terjaganya Stabilitas Harga Pokok Kebutuhan Pokok	Tingkat Inflasi	Kenaikan Harga Barang dan Jasa Secara Umum dan Terus Menerus Dalam jangka Waktu Tertentu	$\text{Inflasi}_n = \frac{\text{IHK}_n - \text{IHK}_{(n-1)}}{\text{IHK}_{(n-1)}} \times 100$ <p>Dengan: Inflasi_n = Inflasi pada periode ke-n IHK_n = Indeks harga konsumen (IHK) pada periode ke-n IHK_{n-1} = Indeks harga konsumen (IHK) pada periode ke-n-1</p>	Sekretariat Daerah
	Meningkatkan Kualitas Kerjasama	Persentase Peningkatan Penerimaan Manfaat Industri Ekstraktif dalam Bentuk TJSLP	Perusahaan ekstraktif pada dasarnya merupakan sebuah badan usaha yang kegiatannya berfokus dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber	Jumlah Desa Penerima Manfaat CSR tahun n dikurangi Desa Penerima Manfaat TJSLP tahun n-1 x 100%	Sekretariat Daerah

	Pembangunan Bidang Ekonomi		daya alam ini dapat dilakukan dengan mengeksplorasi, mengambil maupun memprosesnya guna memenuhi kebutuhan manusia. Jenis perusahaan ini mengambil bahan bakunya langsung dari alam atau mengolah sumber daya alam. Sebagai contohnya adalah pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan hingga pertambangan. Selisih Jumlah Desa Penerima Manfaat dari hasil Industri Ekstraktif tahun n dikurang dengan jumlah desa penerima manfaat TJSLP di tahun n-1 dibagi dengan jumlahtotal desa penerima manfaat TJSL tahun n-1 dikali dengan 100%.	Jumlah Total Desa Penerima manfaat TJSLP tahun n-1	
	Meningkatnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Ketapang	Nilai RB Sekretariat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi adalah suatu indikator yang menilai upaya pemerintah dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), tKetatalaksanaan dan sumber daya aparatur dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik (good governance)	Nilai dari Inspektorat Kab. Ketapang	Sekretariat Daerah
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan keuangan daerah sesuai standar	Prinsip - prinsip akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan PD	Jumlah dokumen pertanggungjawaban <u>Laporan Keuangan PD sesuai SAP</u> x 100% Jumlah PD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang milik Daerah	Persentase Pengelolaan aset sesuai standar	Pengelolaan aset daerah sesuai standar adalah proses mengelola semua aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau entitas publik lainnya dengan mengikuti pedoman, kebijakan, dan praktik terbaik yang ditetapkan oleh standar yang	Jumlah PD yang melaksanakan <u>Rekonsiliasi Barang milik daerah</u> x 100% Jumlah PD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

			berlaku. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut dikelola secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat memberikan nilai optimal bagi masyarakat dan pemerintah daerah.		
3	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Badan Pendapatan Daerah
4.	Konsistensi Keterpaduan antara Dokumen Perencanaan	Persentase Keterpaduan antara dokumen perencanaan	Kesesuaian jumlah program dalam dokumen RKPD dengan jumlah program yang ada dalam dokumen RPJMD dan Kesesuaian jumlah program yang ada dalam Renja PD dengan jumlah program yang ada dalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah Program dalam RKPD}}{\text{Program dalam RPJMD}} \times 100\%$	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya Ketercapaian Sasaran Daerah	Persentase Ketercapaian Sasaran Daerah	Persentase Sasaran yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tercapai lebih dari 91% dibandingkan dengan jumlah sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD	$\frac{\text{Jumlah Program dalam Renja-PD}}{\text{Program dalam RKPD}} \times 100\%$	
				(Jumlah Capaian Sasaran RPJMD dengan Nilai Minimum 91% dibagi Jumlah Seluruh Sasaran dalam RPJMD)	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Organisasi Pemerintah Daerah	Persentase PD dengan Nilai SAKIP minimal B	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan nilai yang diperoleh dari Hasil Evaluasi Internal terhadap Perangkat Daerah mencakup Komponen Perencanaan,, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja. Perhitungan persentasenya terhadap nilai Sakip PD yang memperoleh minimal B.	$\frac{\text{Jumlah PD dengan nilai SAKIP Minimal B}}{\text{Jumlah PD yang dievaluasi}} \times 100\%$	Inspektorat
	Meningkatnya kualitas pengawasan internal	Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Level maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) merupakan penilaian yang diberikan oleh BPKP atas penerapan sistem pengendalian internal pemerintah daerah.	Hasil <i>Quality Assurance</i> BPKP	Inspektorat

			<p>Pengukuran tingkat ini akan memberikan gambaran dan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terdiri dari lima unsur, yaitu : 1) Lingkungan pengendalian; 2) Penilaian risiko; 3) Kegiatan pengendalian; 4) Informasi dan komunikasi serta 5) Pemantauan pengendalian intern.</p>		
	<p>Meningkatnya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan</p>	<p>Persentase Penyelesaian TLHP</p>	<p>Penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan adalah proses mengambil langkah-langkah konkret untuk menangani dan menyelesaikan temuan atau masalah yang diidentifikasi selama proses pemeriksaan atau audit oleh badan pengawas, auditor eksternal, atau tim audit internal.</p>	<p>Persentase Rekomendasi yang ditindak-lanjuti (ITKAB, ITPROV dan BPK) _____ x 100%</p> <p>Jumlah total rekomendasi</p>	<p>Inspektorat</p>

6.	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas Pegawai	Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ <div> $IP_1 = W_{11} \cdot R_{11}$ $IP_2 = W_{2k} \cdot R_{2k}$ $IP_3 = W_{3j} \cdot R_{3j}$ $IP_4 = W_{4m} \cdot R_{4m}$ </div> <p>Dimana IP = Indeks Profesionalisme IP_k = Indeks Profesionalisme ke-k IP_j = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_j = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_j = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_j = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin W₁₁ = Bobot Sub Dimensi Kualifikasi ke-1 • Rating Jawaban Sub Dimensi Kualifikasi ke-1 W_{2k} = Bobot Sub Dimensi Kompetensi ke-k • Rating Jawaban Sub Dimensi Kompetensi ke-k W_{3j} = Bobot Sub Dimensi Kinerja ke-1 • Rating Jawaban Sub Dimensi Kinerja ke-1 W_{4m} = Bobot Sub Dimensi Disiplin ke-m • Rating Jawaban Sub Dimensi Disiplin ke-m</p>	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7.	Meningkatnya kajian dan analisis untuk kebijakan pembangunan daerah	Persentase pemanfaatan hasil Litbang	Pemanfaatan hasil Litbang merupakan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) yang digunakan dan memberikan manfaat nyata dalam berbagai bidang kehidupan.	$\frac{\text{Jumlah Kelitbangan yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Kelitbangan dalam Renja-PD}} \times 100\%$	Badan Penelitian dan Pengembangan
8.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rata-rata kepemilikan dokumenn kependudukan	Kualitas pelayanan administrasi kependudukan mengacu pada sejauh mana layanan yang diberikan oleh lembaga atau instansi yang bertanggung jawab atas administrasi data kependudukan (seperti catatan kelahiran, catatan kematian, dan identitas penduduk) memenuhi standar yang diharapkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang berkualitas dalam administrasi kependudukan melibatkan berbagai aspek, termasuk efisiensi, aksesibilitas, keakuratan, kecepatan, keamanan data, dan responsif terhadap kebutuhan individu dan masyarakat.	$\frac{\sum \text{Masyarakat yang memiliki Dokumen Kependudukan}}{\sum \text{Total Masyarakat yang wajib Dokumen Kependudukan}} \times 100\%$	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Rata-rata kepemilikan dokumen catatan sipil		$\frac{\sum \text{Masyarakat yang memiliki Dokumen Catatan Sipil}}{\sum \text{Total Masyarakat yang wajib Dokumen Catatan Sipil}} \times 100\%$	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase PD yang memanfaatkan dokumen kependudukan		$\frac{\text{Jumlah PD yang telah memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian}}{\text{Jumlah PD yang wajib memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian}} \times 100\%$	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

9.	Meningkatnya keterbukaan informasi terhadap publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah alat untuk mengukur tingkat transparansi dan keterbukaan informasi publik yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat. Indeks ini memberikan gambaran tentang sejauh mana pemerintah atau lembaga publik mengedepankan prinsip akses terhadap informasi publik, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, dan menjalankan kewajiban mereka dalam memberikan akses terbuka terhadap data dan dokumen yang relevan.	Bobot Nilai dari 4 Indikator: Mengumumkann informasi publik; Menyediakan informasi publik; Pelayanan informasi publik; dan Pengelolaan informasi dan dokumentasi informaasi publik.	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya pemanfaatan data statistik sektoral	Persentase PD yang memanfaatkan data statistik sektoral dalam pembangunan daerah	Meningkatnya pemanfaatan data statistik sektoral merujuk pada peningkatan penggunaan data statistik yang terkait dengan sektor-sektor tertentu dalam kegiatan pemerintahan. Data statistik sektoral merupakan informasi yang dikumpulkan dan diolah untuk memberikan wawasan mendalam tentang berbagai aspek dalam suatu sektor, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, pertanian, industri, dan lain sebagainya.	Jumlah PD yang menggunakan data Statistik dalam pembangunan Daerah x 100% Jumlah PD	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Terintegrasinya jaringan antar PD dan Pengelolaan Domain Pemerintah Daerah	Persentase Integrasi jaringan antar PD dan Pengelolaan Domain Pemerintah Daerah	Terintegrasinya jaringan antar Pemerintah Daerah (PD) dan pengelolaan domain Pemerintah Daerah merujuk pada upaya untuk menghubungkan dan menyatukan sistem, data, serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) antara berbagai entitas pemerintah daerah dalam satu wilayah atau negara. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem digital yang terintegrasi dan efisien,	$\frac{\text{Jumlah Aplikasi}}{\text{Jumlah Aplikasi yang terintegrasi}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika

			memudahkan akses informasi, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.		
	Meningkatnya keamanan informasi	Indeks KAMI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001.	Hasil Assessment Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) oleh BSSN	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Meningkatnya Dukungan DPRD terhadap Peran DPRD sesuai Tugas dan Fungsinya	IKM Sekretariat DPRD	Meningkatnya dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap peran DPRD sesuai tugas dan fungsinya merujuk pada upaya untuk memperkuat peran dan kontribusi DPRD dalam menjalankan tugas-	$\text{Nilai Unsur (Nilai Rata-Rata Pelayanan)} \times 25\%$ NRR per Unsur (Nilai Kuestioner yang terisi) dibagi NRR Tertimbang	Sekretariat DPRD
11	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM Kecamatan	Persentase IKM Kecamatan yang dihitung berdasarkan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan dan fasilitas publik di suatu kecamatan atau wilayah tertentu.	$\text{Nilai Unsur (Nilai Rata-Rata Pelayanan)} / \text{NRR per Unsur (Nilai Kuisisioner yang terisi)} \text{ dibagi NRR Tertimbang} \times 25\%$	Kecamatan
12	Meningkatnya akses dan kualitas jaringan jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Jalan Mantap adalah jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	$\frac{\text{Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap}}{100\%} \times \text{Jumlah total panjang jalan kabupaten}$	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak apabila rumah tangga memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL atau bisa	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik}}{\text{Jumlah rumah tangga total}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

		juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di perdesaan		
Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (<i>access to improved water</i>) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak}}{\text{Jumlah rumah tangga seluruhnya}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatnya kualitas tata ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan	<ul style="list-style-type: none">-kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.-rencana kegiatan pemanfaatan ruang di atas tanah dan rencana kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan atau di atas tanah yang akan diberikan hak pengelolaan untuk kegiatan yang bersifat strategis	$\frac{\text{Luas pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan}}{100\%} \times \text{Luas total pemanfaatan}$	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatnya cakupan layanan irigasi	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	Daerah irigasi adalah kesatuan lahan kewenangan kabupaten yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.	$\frac{\text{Jumlah luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi}}{\text{Jumlah luas daerah irigasi kewenangan kabupaten}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

	Meningkatnya Upaya mitigasi dan penanggulangan bencana	Rasio luas kawasan Permukiman sepanjang daerah rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindung oleh infrastruktur pengaman	Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman yang menjadi kKewenangan Kab/Kota	Persentase daerah rawan yang memiliki pengendali abrasi pantai + Persentase Daerah Rawan Longsor Yang Memiliki Tembok Penahan Memadai + Persentase Daerah Pertanian Yang Telah Memiliki Tanggul Penahan Air Asin Memadai +Persentase Daerah Rawan Kebakaran Lahan Yang memiliki Irigasi Sekat-Sekat Bakar Memadai + Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
13	Meningkatnya kualitas Transportasi	Rasio konektivitas	<ul style="list-style-type: none"> - Aksesibilitas yang mampu mempermudah jangkauan antar wilayah - Perbandingan antara jumlah satuan permukiman dalam suatu wilayah dengan jumlah jaringan system transportasi (jalan) yang menghubungkan antar wilayah 	Rasio konektivitas Kabupaten atau Kota = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$	Dinas Perhubungan
14	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	Rasio rumah layak huni	<p>Rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita (<i>sufficient living space</i>); 2. memiliki akses terhadap air minum layak; 3. memiliki akses terhadap sanitasi layak; 4. ketahanan bangunan (<i>durable housing</i>), yaitu atap terluas berupa beton/genteng/seng/kayu/sirap; dinding terluas berupa tembok/plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/granit/keramik/parket/vinil/karpet/ubin/tegel/teraso/kayu/papan/semen/bata merah. 	$(\text{Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu} / \text{Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}) \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada lingkup dan periode tertentu	<p>Langkah 1</p> $PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$ <ul style="list-style-type: none"> - PI_j = indeks pencemaran bagi peruntukan j - $(C_i/L_{ij})_M$ adalah nilai maksimum dari C_i/L_{ij} - $(C_i/L_{ij})_R$ adalah nilai rata-rata dari C_i/L_{ij} - C_i = konsentrasi parameter kualitas air i - L_{ij} = konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku peruntukan air j - Parameter yang digunakan DO, COD, TSS, BOD, E Coli, Total Coliform, Total Phosphat <p>Langkah 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi terhadap PI_j - Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 < PI_j < 1,0$ - Tercemar ringan jika $1,0 < PI_j < 5,0$ - Tercemar sedang jika $5,0 < PI_j < 10,0$ - Tercemar berat jika $PI_j > 10,0$ <p>Langkah 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah titik sampel yang memenuhi baku mutu air dijumlahkan dan dibuat dalam persentase dengan membaginya terhadap seluruh jumlah sampel. <p>Langkah 4</p> <p>Masing-masing persentase pemenuhan baku mutu air kemudian dikalikan bobot indeks. Kemudian dijumlahkan didapatkanlah IKA</p>	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
--	---------------------------	---------------------------	---	---	--

Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada lingkup dan periode tertentu	$IPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$ <p>IPU = Indeks Pencemar Udara IPNO₂ = Indeks Pencemar NO₂ IPSO₂ = Indeks Pencemar SO₂</p> <p>Indeks Pencemar Udara tersebut merupakan indeks pencemar udara yang telah dibandingkan dengan Referensi standar European Union atau dapat disebut Indeks Udara Model EU. Selanjutnya Indeks Udara Model EU tersebut dikonversi menjadi Indeks Kualitas Udara untuk perhitungan IKLH.</p> $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.	$IKLT = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times 50 / 54,3)$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase sampah tertangani	Pengelolaan persampahan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi penanganan sesuai dengan jenis Sampah	$\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

		Persentase sampah berkurang	Pengelolaan persampahan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sesuai dengan jenis Sampah	$\frac{\text{Total volume sampah yang berkurang}}{\text{Total volume timbunan sampah}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
15	Meningkatnya produksi tanaman pangan	Produksi Tanaman Pangan Jumlah produksi - Padi (ton) - Jagung (ton) - Kedelai (ton) - Ubi Kayu (ton)	Produksi Tanaman Pangan diperoleh dari penjumlahan produksi komoditas : Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu pada tahun ke-n dalam satuan ton	Luas panen (ton) x Produktivitas (ton/ha)	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
	Meningkatnya produksi tanaman hortikultura	Produksi tanaman Hortikultura Jumlah produksi - Sayuran semusim - Buah-buahan tahunan	Produksi Tanaman Hortikultura diperoleh dari penjumlahan produksi komoditas sayuran semusim dan buah-buahan pada tahun ke-n dalam satuan ton	Luas panen (ton) x Produktivitas (ton/ha)	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
	Meningkatnya produksi tanaman perkebunan	Produksi tanaman perkebunan Jumlah produksi - Karet - Kelapa - Kopi - Kelapa Sawit PBS - Kelapa Sawit Rakyat - Lada	Produksi Tanaman Perkebunan diperoleh dari penjumlahan produksi komoditas tanaman perkebunan (Karet, kelapa, kopi, kelapa sawit PBS, kelapa sawit rakyat, dan Lada) pada tahun ke-n dalam satuan ton	Luas panen (ton) x Produktivitas (ton/ha)	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
	Meningkatnya kualitas produk pertanian	Persentase produk pertanian bersertifikat - Produk Tanaman Pangan - Produk Tanaman Hortikultura - Produk Tanaman Perkebunan	Proses Pemberian Tanda atau Label resmi yang menunjukkan bahwa produk pertanian telah memenuhi standar tertentu yang ditetapkan oleh otoritas atau Lembaga yang berwenang. Dalam rangka menjamin kualitas, keamanan dan keberlanjutan produk pertanian yang akan dijual atau dikonsumsi	$\frac{\text{Jumlah produk pertanian bersertifikat}}{\text{Total produk pertanian}} \times 100\%$	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
	Meningkatnya produksi hasil peternakan	Produksi hasil ternak - Daging Ternak Besar - Daging Ternak Kecil - Daging Ternak Unggas - Telur	Produksi hasil ternak yang dihitung keseluruhan populasi ternak dari hasil pertambahan populasi dalam 1 tahun	Jumlah Produksi Asal Ternak Tahun (n)	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

	Meningkatnya populasi ternak	Populasi ternak - Daging Ternak Besar - Daging Ternak Kecil - Daging Ternak Unggas	ternak yang dihitung keseluruhan populasi ternak dari hasil pertambahan populasi dalam 1 tahun	<p>Populasi Ternak = Jumlah Ternak Awal + Lahir - Mati + Masuk - Keluar</p> <p>Di mana:</p> <p>Jumlah Ternak Awal: Jumlah ternak pada awal periode yang Anda hitung.</p> <p>Lahir: Jumlah ternak yang lahir selama periode tersebut.</p> <p>Mati: Jumlah ternak yang mati selama periode tersebut.</p> <p>Masuk: Jumlah ternak yang masuk ke dalam populasi selama periode tersebut, misalnya melalui pembelian atau pindah dari tempat lain.</p> <p>Keluar: Jumlah ternak yang keluar dari populasi selama periode tersebut, misalnya melalui penjualan, pindah, atau pemotongan.</p> <p>Rumus ini akan memberikan Anda perkiraan populasi ternak pada akhir periode tertentu jika Anda memiliki data yang lengkap dan akurat tentang semua faktor di atas. Namun, dalam dunia nyata, perhitungan ini bisa lebih kompleks karena faktor-faktor seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian, perubahan dalam pergerakan ternak, dan lain-lain dapat bervariasi dari waktu ke waktu</p>	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
16	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Hasil tangkapan ikan yang dilakukan diperairan laut dan perairan umum baik yang didaratkan dipelabuhan atau non Pelabuhan.	Jumlah produksi perikanan x 100 Tangkap (ton) / Target daerah	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Meningkatnya Produksi	Produksi perikanan Budidaya	seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan budidaya ikan/binatang air	Jumlah produksi perikanan x 100 budidaya (ton) / Target daerah	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

	Perikanan Budidaya		lainnya/tanaman air yang dipanen dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan dalam bentuk basah. Termasuk juga kegiatan pembenihan ikan.		
	Meningkatnya Kualitas Produk perikanan	Persentase produk perikanan yang bersertifikat	Produk Hasil Perikanan yang telah memenuhi syarat SNI/BPOM/DinKes berdasarkan hasil uji nutrisi dan mutu di Laboratorium	Jumlah produk olahan perikanan x 100 yang bersertifikat / Total produk olahan perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase ketersediaan pangan / Indeks ketersediaan	Kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi, dan cadangan pangan daerah serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan	Hasil penilaian Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Indeks keterjangkauan	Kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan,	Hasil penilaian Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Indeks pemanfaatan	Indeks pemanfaatan pangan adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu daerah berhasil memanfaatkan atau memenuhi kebutuhan gizi penduduknya.	Hasil penilaian Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
17	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	Koperasi berkualitas merupakan hasil penilaian kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi suatu koperasi, mencakup penilaian aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan, likuiditas dan jatidiri koperasi	$\frac{\text{Koperasi sehat tahun n} - \text{Koperasi sehat Tahun n-1}}{100\%} \times \text{Jumlah Koperasi}$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
	Meningkatnya Usaha Mikro menjadi Kecil dan	Persentase Peningkatan Omzet Usaha Menengah,	Total dari penjualan produk usaha menengah, kecil dan mikro dalam kurun waktu 1 (satu) tahun (pendapatan bruto)	$\frac{\text{Omzet UMKM tahun n} - \text{Omzet UMKM tahun n-1}}{100\%} \times$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

	Menengah	Kecil dan Mikro		Omzet UMKM tahun n-1	Perdagangan dan Perindustrian
	Optimalnya Nilai Perdagangan	Peningkatan Nilai perdagangan	Nilai transaksi perdagangan disuatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu waktu tertentu (biasanya 1 tahun)	$\frac{\text{Nilai perdagangan tahun } n - \text{Nilai Perdagangan tahun } n-1}{100\%} \times \text{Nilai perdagangan tahun } n-1$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
	Meningkatnya Kelancaran Distribusi Barang	Tingkat kelancaran distribusi barang	Kegiatan penyaluran hasil produksi barang untuk mempermudah dan memperlancar penyampain barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.	Survei mandiri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
	Meningkatnya Nilai Produksi IKM	Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM	Nilai produksi mengacu pada jumlah total produk atau jasa yang dihasilkan oleh sektor industry kecil dan menengah selama satu periode waktu tertentu.	$\frac{\text{Nilai Produksi IKM tahun } n - \text{Nilai produksi IKM tahun } n-1}{100\%} \times \text{Nilai Produksi IKM tahun lalu } n-1$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
18	Peningkatan daya tarik mesyarakat terhadap warisan budaya	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Warisan budaya adalah peninggalan yang merepresentasikan sistem nilai, kepercayaan, tradisi, gaya hidup, dan jejak-jejak suatu kebudayaan yang terus-menerus diwariskan dari masa lalu hingga masa sekarang. Warisan budaya benda adalah warisan budaya berupa benda-benda material atau fisik yang dapat dilihat dan juga konkrit. Warisan budaya tak benda adalah peninggalan budaya yang tidak semuanya dapat diraba, tetapi diketahui dan dirasakan keberadaanya. Bisa dalam bentuk pengetahuan, ekspresi, lisan, aktivitas masyarakat, dan sebagainya.	$\frac{\text{Jumlah budaya benda dan tak benda yang dilestarikan}}{100\%} \times \text{Jumlah seluruh budaya benda dan tak benda}$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Meningkatnya kunjungan	Persentase peningkatan wisatawan (dalam negeri dan mancanegara)	Setiap orang yang melakukan perjalanan ke tujuan utama di luar lingkungan biasanya sekurang-kurangnya 24 jam dan tidak lebih dari satu tahun, untuk tujuan (bisnis, liburan, atau tujuan pribadi lainnya) selain untuk dipekerjakan oleh	$\frac{\text{Jumlah wisman dan wisnu tahun } n - \text{Jumlah Wisman dan wisnu tahun } n-1}{100\%} \times \text{Jumlah wisman dan wisnu tahun } n-1$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

			entitas penduduk di daerah yang dikunjungi		
19	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi PMDN/ PMA	<ul style="list-style-type: none"> - PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Ketapang yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. - PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri 	$\frac{\text{Jumlah investasi tahun n} - \text{Jumlah investasi tahun n-1}}{100\% \text{ Jumlah investasi tahun n-1}} \times$	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Hasil survey mandiri	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	Meningkatnya wirausaha baru	Persentase peningkatan wirausaha baru	Wirausaha adalah seseorang/individu yang bisa menciptakan bisnis sendiri, menanggung sebagian besar risiko dan juga menikmati keuntungan dari usaha yang dirintisnya.	$\frac{\text{Jumlah wirausaha tahun n} - \text{Jumlah wirausaha tahun n-1}}{100\% \text{ Jumlah wirausaha tahun n-1}} \times$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat kesempatan kerja	Tingkat kesempatan kerja mengacu pada rasio jumlah orang yang berhasil mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan jumlah orang yang mencari pekerjaan atau potensi Angkatan kerja di suatu wilayah atau negara pada suatu waktu tertentu.	$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan
	Meningkatnya Penyelesaian Hubungan	Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	Penyelesaian hubungan industrial adalah mengacu pada proses atau Tindakan	$\frac{\text{Jumlah Kasus yang Telah Diselesaikan}}{\text{Jumlah Kasus yang Terdaftar}} \times 100\%$	Transmigrasi

	Indusrial		untuk menyelesaikan konflik atau sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan industrial. Hal ini termasuk perundingan, mediasi, atau proses hukum yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan atau resolusi yang memadai.		
	Meningkatnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Eks Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi dan lokasi eks transmigrasi yang berkembang	Pengembangan kawasan transmigrasi adalah upaya untuk mengelola dan memanfaatkan wilayah yang sebelumnya telah digunakan untuk program transmigrasi.	$\frac{\text{Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan}}{\text{Jumlah Kawasan Transmigrasi dan Eks Transmigrasi}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan
	Meningkatnya serapan tenaga kerja dalam industri ekstraktif	Persentase serapan tenaga kerja dalam industri ekstraktif	Tenaga kerja Industri ekstraktif adalah tenaga kerja yang bekerja pada industri yang berkaitan dengan pengambilan kekayaan alam dan memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, termasuk di dalamnya Industri Perikanan, Industri Pertanian dan Kehutanan, Industri Pertambangan, industri Peternakan.	$\frac{\text{Realisasi tenaga kerja lokal yang diterima di industri ekstratif pada tahun } n}{\text{Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri ekstraktif tahun } n} \times 100\%$	Transmigrasi
21	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Meningkatnya Derajat Pendidikan	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Dimana :</p> <p>RSL = Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke atas</p> <p>x_i = Lama Sekolah Penduduk ke-i yang berusia 25 Tahun</p> <p>n = Jumlah Penduduk Usia 25 Tahun ke atas</p>	Dinas Pendidikan

			<p>APK (ANGKA PARTISIPASI KASAR)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PAUD 2. SD/MI/PAKET A 3. SMP/MTs/PAKET B 	$\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ Penitipan anak}}{\text{Jumlah anak usia 4-6 tahun}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan
			<p>APK (ANGKA PARTISIPASI MURNI)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SD/MI/PAKET A 2. SMP/MTs/PAKET B 	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan
22	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (1/100.000 KH)	$\frac{\text{Jumlah Kematian Karena Kehamilan, Persalinan, masa nifas atau komplikasi – komplikasi selama 1 periode}}{\text{Jumlah Kelahiran hidup selama periode yang sama dikali}} \times 100.000$	Dinas Kesehatan

			Angka Kematian Bayi (1/1.000 KH)	$\frac{\text{Jumlah bayi usia 0 – 11 bulan yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup diwilayah pada kurun Waktu yang sama}} \times 1.000$	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	$\frac{\text{Jumlah kasus gizi buruk balita berdasarkan BB/TB disuatu wilayah pada periode tertentu}}{\text{Jumlah seluruh balita yang ada disuatu wilayah periode tertentu}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan
			Angka Kesakitan (Morbiditas)	$\frac{\text{Indeks Penyakit menular} + \text{Indeks Penyakit Tidak Menular}}{2}$	Dinas Kesehatan
			Angka Stunting	$= \frac{\text{Jumlah Baduta Stunting}}{\text{Jumlah Baduta}} \times 100\%$ <p>Penilaian Hasil Pengukuran Antropometri terhadap Tinggi Badan (Usia 2 Tahun atau Lebih) dengan 2 Macam Alat Ukur :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Baby Length Board</i> ▪ <i>Vertical Measures</i> <p>Analisis Hasil Pengukuran Antropometri dengan Menggunakan Nilai Skor – Z atau SD</p>	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bappeda
23	Meningkatnya Prestasi Keolahragaan dan Kualitas Pemuda	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	Hasil optimal yang dicapai oleh seorang olahragawan (atlit) atau sekelompok orang (tim/regu) dalam kompetisi beregu maupun individu.	$\frac{\text{Jumlah prestasi olahraga tahun n} - \text{Jumlah prestasi olahraga tahun n-1}}{\text{Jumlah prestasi olahraga tahun n-1}} \times 100\%$	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya Kualitas Kewirausahaan Pemuda	Persentase Peningkatan Wirausaha Muda	Wirausaha muda adalah individu yang memulai dan mengelola usaha atau bisnis mereka sendiri pada usia relative muda (16-30) tahun.	$\frac{\text{Jumlah UKM yang dikembangkan oleh Pemuda tahun n} - \text{Jumlah UKM yang dikembangkan oleh pemuda tahun n-1}}{\text{Jumlah UKM yang dikembangkan oleh pemuda n-1}} \times 100\%$	Dinas Pemuda dan Olahraga

24	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kearsipan	Prosentase Pencipta Arsip yang melaksanakan Tata Kelola Kearsipan sesuai Ketentuan	Pencipta Arsip adalah entitas atau individu yang bertanggung jawab atas pembuatan, pengumpulan, dan pengelolaan arsip sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola kearsipan. Mereka memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa dokumen-dokumen dan rekaman-rekaman penting diorganisir, disimpan, dan dapat diakses dengan efisien dan efektif.	Jumlah Pencipta Arsip yang melaksanakan Tata Kelola Kearsipan sesuai ketentuan x 100% Jumlah sasaran Pencipta Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
		Nilai Survey kepuasan Masyarakat Pembinaan Kearsipan	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu layanan atau program yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah atau swasta. Dalam hal ini, SKM yang dimaksud adalah SKM terkait dengan pembinaan kearsipan.	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PERMENPAN No. 16 Tahun 2014)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Prosentase Peningkatan Pemustaka	Peningkatan pemustaka adalah upaya untuk meningkatkan jumlah dan kepuasan pemustaka dalam menggunakan layanan perpustakaan.	Jumlah Pemustaka Tahun Berjalan - Jumlah Pemustakatahun Sebelumnya x 100% Jumlah Pemustaka Tahun Sebelumnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan	Nilai Survey kepuasan Masyarakat Pelayanan Perpustakaan	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu layanan atau program yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah atau swasta. Dalam hal ini, SKM yang dimaksud adalah SKM terkait dengan pelayanan perpustakaan.	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PERMENPAN No. 16 Tahun 2014)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
25	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Penurunan angka PPKS adalah indikator yang menggambarkan situasi di mana persentase penduduk yang masuk dalam DTKS mengalami penurunan.	Jumlah data DTKS tahun n-1 dikurang Jumlah data DTKS tahun n x 100% Jumlah data DTKS tahun n	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya Keberdayaan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IDG adalah suatu indikator statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat	$\frac{I(\text{Par}) + I(\text{DM}) + I(\text{inc} - \text{des})}{3}$	Dinas Sosial, Pemberdayaan

	Perempuan dan Perlindungan Anak		pemberdayaan gender dalam suatu populasi atau masyarakat. IPG mengukur sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang seimbang untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan ekonomi, politik, dan sosial.	I (par) : Indeks Keterwakilan di Parlemen I (DM) : Indeks Pengambil Keputusan I (inc-des) : Indeks Distribusi Pendapatan	Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor KLA merupakan penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan bagi anak-anak. Skor KLA diperoleh melalui pengukuran berbagai indikator, seperti akses pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan partisipasi anak dalam kehidupan sosial.	Hasil perhitungan melalui Evaluasi Mandiri KLA dengan menjawab pertanyaan pada setiap indikator kelembagaan dan indikator penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR) adalah ukuran yang digunakan untuk menghitung rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa hidupnya.	$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total ASFR_i = ASFR untuk wanita pada kelompok usia ke-i i = Kelompok usia 15-19,20-24,....,45-49</p>	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
26	Meningkatnya Jangkauan dan Mutu Layanan Rumah Sakit	Standar Akreditasi Rumah Sakit	Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS versi KARS International merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar akreditasi RS versi KARS.	Hasil penilaian Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)	RSUD dr AGOESDJAM

27	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Desa Status Mandiri	Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi pemenuhan 4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik dengan nilai IDM > 0,815	<p>IKS : Indeks Ketahanan Sosial IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan</p> $IDM = \frac{IKS+IKE+IKL}{3}$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
28	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Badan Hukum Dalam Mematuhi Berbagai Produk Hukum Daerah baik Peraturan Daerah maupun Peraturan/Keputusan Bupati	Persentase Masyarakat dan Badan Hukum yang Taat akan Perda, Peraturan, dan Keputusan Bupati	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda, Peraturan, dan Keputusan Bupati yang terselesaikan.	$\frac{\text{Persentase Jumlah Penanganan Perda, Peraturan/Kep. Bupati yang}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda, Peraturan/Kep. Bupati}} \times 100$	Satuan Polis Pamong Praja
	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman	Situasi dan Kondisi Ketapang yang Tertib dan Tenteram	Jumlah Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Anarkisme Akibat Unjuk Rasa /Demonstrasi	$\frac{\sum \text{Pelanggaran K - 3 yang Tertangani}}{\sum \text{Pelanggaran K - 3 yang Terjadi}} \times 100\%$	Satuan Polis Pamong Praja

29	Peningkatan Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan Paska Konflik	Prosentase Potensi Gangguan/Konflik yang Teratasi	Jumlah Potensi Gangguan/Konflik yang Teratasi	$\frac{\text{Jumlah Potensi Gangguan/Konflik yang Teratasi}}{\text{Jumlah Potensi Gangguan/Konflik yang Terjadi}} \times$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya Wawasan dan Pemahaman Masyarakat di Bidang Politik	Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pendidikan Politik	$\frac{\text{Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pendidikan}}{\text{Kelompok Masyarakat yang Menjadi Sasaran Pendidikan Politik}} \times 100$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30	Meningkatnya Upaya Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana	$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$ <p>Dimana: Risk = Risiko Hazard = Bahaya Vulnerability = Kerentanan Capacity = Kapasitas</p>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
MINTARIA, SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700703 199903 1 007

BUPATI KETAPANG,
TTD
MARTIN RANTAN